

Baru

Dibangun, Jalan Sudah Rusak

TIM BATAM POS, Seibeduk

AKTIVITAS truk bermuatan tanah dan batu di Bagan, Seibeduk merusak jalan aspal. Padahal, jalan di kawasan itu baru saja dibangun. Kondisi tersebut sangat mengganggu bahkan membahayakan pengen-

dara yang melintas.

Aminah, warga Kaveling Sungai Daun mengatakan, kerusakan jalan semakin hari semakin bertambah. "Paling parah di depan rumah saya dan Polsek Seibeduk," ujar Aminah, Senin (26/20.

Baru Dibangun, Jalan Sudah Rusak

Sambungan dari hal 9

Dia menuturkan, sebelumnya pemilik proyek sudah memperbaiki kerusakan di jalan ini. Hanya saja, karena seringnya kendaraan roda enam lalu-lalang, menyebabkan jalan kembali rusak. Kerusakan terlihat baik di jalan yang sudah diperbaiki maupun di titik lainnya. "Truk itu mondar-mandir hampir puluhan kali. Apa nggak rusak ini jalan," keluhnya.

Padahal, kata dia, jalan yang menghubungkan Kampung Bagan dengan wilayah lain di Seibeduk itu, baru saja dibangun. "Belum sampai lima tahun. Jalannya sudah banyak berlubang," ungkapnya.

Keluhan juga datang dari Sulaiman, warga lainnya. Bahkan, kata dia, aktivitas truk itu juga sangat membahayakan pengguna jalan. Sebab, sebagian besar truk yang mengangkut batu dan tanah tanpa penutup dikhawatirkan akan menimpa pengendara. "Waswas juga kalau lagi jalan di belakangnya," jelas pria 40 tahun itu.

Untuk itu, warga berharap keluhan mereka direspons pihak kecamatan ataupun kepolisian setempat agar ak-

tivitas kendaraan proyek itu tak sampai mengganggu dan merusak jalan.

Sementara itu, pihak Kecamatan Seibeduk yang dicoba konfirmasi enggan memberikan tanggapan. Bahkan Camat Seibeduk Science Taufik Riyadi tidak bisa ditemui maupun dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Sementara itu, kerusakan jalan juga terlihat di sepanjang Jalan Marina City, Batuaji. Pemicunya sama, yakni aktivitas truk pengangkut tanah. Bahkan sebelum dihentikan paksa oleh warga, aktivitas kendaraan proyek dengan sepuluh roda puluhan kali hilir mudik di sepanjang Jalan Marina City ini.

Bergelombang dan Berlubang

Kualitas jalan di Batam sepertinya layak dipertanyakan. Sebab, meski sudah diperbaiki, jalan kerap berlubang dan bergelombang. Apalagi tak ada perbedaan jalur antara kendaraan biasa dan trailer. Dimana trailer atau truk diduga menjadi penyebab jalanan di Batam rusak.

Kondisi jalan rusak seperti banyaknya gelombang dapat dirasakan pengendara yang

melintas di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di Seraya Atas. Apalagi posisi jalan bergelombang berada di pengkolan yang dapat membahayakan pengendara. "Kalau tak tahu bisa jatuh. Jalan yang bergelombang cukup banyak. Apalagi jalur tersebut sering dilalui trailer-trailer besar," terang Iwan, warga Seipanas, kemarin.

Tidak hanya di lokasi tersebut, sejumlah pengendara juga mengeluhkan kondisi jalan berlubang di Bengkong Aljabar. Ada belasan lubang menganga di jalur tersebut, mulai dari kecil hingga besar dan dalam.

"Kalau di jalan kawasan Bengkong Aljabar jangan ditanya. Sudahlah jalannya tanjakan, banyak lubang lagi. Pengendara juga kerap senaknya memotong jalan dan yang sabar akhirnya masuk lubang," jelas pria berusia 23 tahun ini.

Kondisi yang sama juga dapat terlihat di Jalan Bunga Raya, Baloí. Bahkan posisi jalan bergelombang itu sudah rusak dan berlubang sehingga bisa membahayakan pengendara. Pengendara yang paling riskan menjadi korban adalah pengendara sepeda motor.

"Pernah hampir jatuh di

sana, karena tak sadar ada (jalan) gelombang. Waktu itu malam hari, jalan yang bergelombang tak terlalu keliatan," imbuh Tommy, warga Baloí.

Sementara di kawasan Seipanas atau tepatnya Jalan Laksamana Bintan jalan rusak masih ada, meski sudah sering dikeluhkan warga.

Selain adanya jalan bergelombang, terdapat belasan titik lubang yang tersebar di tengah dan pinggir jalan. Mirisnya, jalan tersebut merupakan jalur protokol yang kerap dilalui wisatawan.

Selain itu, di jalan baru Batamcenter menuju Bengkong lewat kawasan Ocarina juga sudah mulai rusak. Kerusakan jalan itu kelihatan karena kendaraan yang melintasinya ada yang bertonase berat. Ini karena aspal terlihat jadi mengambang dan menimbulkan gelembung di jalan serta aspal sudah berlubang.

Sejatinya jalan tersebut merupakan jalur alternatif bagi warga Bengkong maupun dari Batamcentre. Karena selain menghemat waktu tempuh juga arus lalu lintas belum terlalu padat dibandingkan kalau harus lewat Jalan Laksamana Bintan.***

Sampah Sumbat Drainase

Akibat Kebiasaan Buruk Warga

SEIBEDUK (BP) - Kebiasaan sebagian warga Batam yang masih saja membuang sampah sembarangan berakibat fatal. Misalnya di Kecamatan Seibeduk. Drainase atau parit utama dipenuhi sampah yang terlihat mulai dari Pintu Empat hingga Simpang Bagan, Seibeduk.

Pantauan *Batam Pos*, sebagian besar sampah berupa bungkus plastik, botol maupun limbah rumah tangga lainnya. Warga sekitar mengaku sampah yang juga berceceran di tepi jalan itu datang dari pedagang dan pengendara yang melintas di jalan tersebut. Mereka membawa bungkus-bungkusan plastik, lalu sambil melintas, mereka melempar sampah ke drainase tersebut. "Masih ada memang warga yang biasa buang sampah di dalam drainase," ujar Muslimin, warga Perumnas Seibeduk, Senin (26/2).

Karena kebiasaan buruk itulah, lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang sering terkena banjir. Air dari drainase

meluap karena dipenuhi sampah. "Dulu paling parah. Tapi sekarang sudah berkurang karena drainase kecil sudah dikeruk," katanya.

Camat Seibeduk Science Taufik Riyadi mengakui hal tersebut. Pola hidup masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan menyebabkan wilayahnya sering terkena banjir. "Kesadaran akan kebersihan memang masih minim," ucap Science, belum lama ini.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam merunkan satu alat berat untuk mengeruk drainase, tepatnya di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga di Pintu Tiga, Seibeduk.

Kepala DBM SDA, Yumasnur mengatakan, normalisasi tersebut memang diintensifkan. Tujuh alat berat seperti long arm, excavator biasa maupun ekskavator amphi dimanfaatkan dan disebar di beberapa titik di Batam. (une/rna)

Larangan RT/ RW Berpolitik Dipertanyakan

BATAMKOTA (BP) - Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 24 Tahun 2017 dipertanyakan esensinya. Sebab dalam perwako tersebut mengatur tentang perangkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) yang dilarang terlibat partai politik. Selain itu, masa jabatan RT/RW juga dibatasi untuk dua periode.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P. Sihaloho yang baru saja terpilih sebagai Ketua RW 006, Bengkong Palapa Swadaya, Kelurahan Tanjung

Larangan RT/RW Berpolitik Dipertanyakan

Sambungan dari hal 9

Buntung, Kecamatan Bengkong, Minggu (18/2) lalu menilai Perwako Nomor 24 Tahun 2017 menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Dasar dan landasan perwako ini dari mana. Kita belum punya perda (peraturan daerah) yang mengatur ini. Sementara Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 5 Tahun 2007 jauh di atas Perwako malah tidak melarang dan

membicarakan hal tersebut,” kata Udin, Senin (26/2).

Ia juga melihat ada diskriminasi bagi masyarakat. Ketika seorang perangkat RT dan RW terpilih atau dipilih yang masuk partai tertentu, seperti ada pendiaman dan pembiaran oleh pihak kelurahan. Sementara RT atau RW terpilih yang bukan dari partai tersebut malah dihambat dan dibenturkan dengan Perwako Nomor 24 Tahun 2017 tersebut.

“Saya sampaikan di paripurna, apa yang menjadi dasar hukum Wali Kota mengeluarkan perwako ini,” tanya Udin.

Sementara itu, tahun 2019 Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Namun, dengan adanya perwako tersebut, membuat hak politik masyarakat dibatasi.

“Tentu saja itu (Perwako Nomor 24 Tahun 2017) menimbulkan keresahan dan

polemik di tengah masyarakat Batam,” kata Udin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad mengakui seluruh perwako sudah sesuai dengan aturan hukum dan yang berlaku. Menurutnya, selama ini tak ada masalah soal RT dan RW. “Selama ini tak ada persoalan. Ada beberapa ribuan RT/RW di Batam ini, selama ini tak ada masalah. Tapi nanti kita akan mengecek kembali,” ujar Amsakar. (rng)

Dipertanyakan

Bangun Puskesmas di Mentarau dan Tembesi

SEKUPANG (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam berencana menambah dua unit fasilitas kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Namun, rencana pembangunan ini baru akan direalisasikan untuk tahun 2019 mendatang.

"Tahun ini sudah ada Tanjungcang yang mulai melayani pasien. Tahun depan kami bangun dua lagi rencananya," kata Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi, Senin (26/2).

Ia menyebutkan, dua puskesmas tersebut akan dibangun di Mentarau, Sekupang dan Tembesi, Batuaji. Dua lokasi ini jumlah penduduknya cukup ramai. Sehingga, penambahan infrastruktur fasilitas kesehatan dinilai sangat dibutuhkan.

Mantan Direktur RSUD Kepri ini mengungkapkan, lahan yang digunakan untuk membangun puskesmas merupakan lahan fasilitas umum (fasum) di perumahan. "Kemarin kami sudah tinjau lokasi bersama orang dari Disperakimtan (Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam)," terangnya.

Untuk pembangunan satu puskesmas, kata dia, membutuhkan dana sebesar Rp 6-7 miliar. Rencananya, anggaran itu akan diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK). "Jumlah itu untuk (bangunan) fisik saja, belum lagi peralatan medis yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk masing-masing puskesmas," bebernya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada 21 puskesmas yang melayani masyarakat yang dibangun Pemko Batam. Selain itu, keberadaan klini-klinik juga membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. "Idealnya, satu puskesmas itu untuk 30 ribu jiwa penduduk," terang dia.

Didi berharap, usulan penambahan dua puskesmas ini bisa disetujui. "Semakin banyak yang berobat ke puskesmas tentu akan berdampak pada pendapatan puskesmas juga," kata dia.

Sementara itu, Maria, warga Tiban Mentarau mengaku gembira dengan rencana Pemko Batam yang akan membangun puskesmas baru di wilayah tersebut. "Bagi warga yang tak punya BPJS (Kesehatan), kan bisa berobat murah ke puskesmas, makanya kita dukung," ujarnya. (yui/rna)

Kios Liar Menjamur di Sekeliling Pasar Seken

BATUAJI (BP) - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam menata ulang Pasar Seken Aviari di Batuaji sebagai ikon wisata di Kota Batam sepertinya akan menemui banyak persoalan. Pasalnya kawasan pasar yang sudah cukup populer sebagai pasar barang bekas terbesar itu, kini sudah dikelilingi kios liar. Lingkungan pasar terlihat kumuh dan tak beraturan.

Informasi yang diterima di lapangan, menjamurnya kios liar tersebut dipicu oleh wacana penataan pasar tersebut. Warga yang semula ragu-ragu berdagang di sana kembali tergiur sebab pasar tersebut tentu akan ramai jika dijadikan sebagai ikon wisata di Kota Batam. Wargapun berlomba-lomba untuk ikut membangun lapak kios baru meskipun harus menempati lahan penghijauan di sekeliling pasar tersebut. "Dulu tak seramai ini. Tapi semenjak ada wacana penataan itu malah muncul kios-kios baru di sekeliling pasar ini," ujar Mukti, pemilik toko pakaian seken di dalam

lokasi pasar tersebut, Senin (26/2).

Kehadiran kios liar itu, kata Mukti, sangat berdampak pada omset penjualan mereka ataupun wacana penataan pasar tersebut. Untuk omset akan terpengaruh karena pelanggan ataupun pembeli harus terbagi dengan pemilik kios liar tersebut. Sementara untuk rencana penataan pasar otomatis akan terhambat karena di sekeliling pasar sudah menjamur kios atau lapak liar tersebut. "Serba salah memang mau diusir pun mereka tempati lahan penghijauan bukan lahan pasar, dibiarkan malah menghambat kami yang sewa ruko di dalam pasar ini," keluh Mukti.

Senada disampaikan Djoko pedagang lainnya. Menjamurnya lapak kios baru di sekeliling kompleks pasar seken itu juga merusak pemandangan pasar seken. Pasar seken yang seharusnya tertata dengan baik dan hanya menempati gedung atau ruko yang ada di dalam pas-

ar kini jadi terlihat amburadul. "Lihat saja dari luar, tak nampak lagi keindahan pasar ini. Bangunan menjamur di mana-mana. Jadi tak rapi. Bagaimana pemerintah mau wujudkan sebagai ikon wisata kalau kondisi pasarnya saja begini," tutur Djoko.

Pedagang tetap di dalam pasar seken tersebut berharap agar wacana penataan itu secepatnya terealisasi sehingga bangunan liar di sekeliling pasar tersebut segera ditertibkan.

"Kalau perlu lahan di luar pasar ini dijadikan taman saja semua, biar rapi dan nyaman lingkungan pasar ini," harap Mukti.

Camat Batuaji Ridwan saat dikonfirmasi mengakui persoalan tersebut. Namun demikian Ridwan tidak merespons berlebihan. Dia bahkan belum mengetahui kapan itu akan ditertibkan. "Kami sudah diperingati tapi mereka tetap bangun. Belum tahu lagi akan ditertibkan. Masih tunggu arahan dari pimpinan," ujar Ridwan, kemarin. (eja)

Pemko Minta Izin Impor Beras Khusus

BATAMKOTA (BP) - Pemerintah Kota Batam tengah menyusun surat permohonan izin impor beras khusus bagi Batam ke pemerintah pusat. Dengan adanya izin impor, diharapkan Batam tak lagi kekurangan stok beras seperti dua bulan terakhir.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, surat permohonan izin impor beras khusus Batam masih dalam proses. Namun, sebelum pengiriman surat itu, pihaknya sudah memberi informasi awal tentang kondisi kebutuhan beras di Batam kepada Komisi VI DPR. Yakni, selama dua bulan, Batam kekurangan hampir 10 ribu ton beras. "Namun untuk lebih lanjut permintaan itu akan kami sampaikan melalui surat. Suratnya masih proses, kalau sudah selesai akan langsung dikirim," terang Amsakar di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (26/2).

Kondisi Batam yang bukan daerah penghasil, kata dia, harusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberi izin impor khusus tersebut. Sebab, jika izin diberikan, ia bisa menjamin stok beras di Batam aman. Selain itu, dari segi harga juga diperkirakan tak akan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bahkan, Amsakar berpendapat jika Bulog Divre Batam juga mempunyai peluang besar mendapat izin impor beras.

"Dalam waktu dekat saya juga ingin mengagendakan pertemuan dengan Bulog. Banyak hal yang akan saya bahas. Di antaranya tentang stok beras dan penyaluran raskin (beras sejahtera) ke warga miskin," imbuh Amsakar.

Selain beras, Amsakar mengaku bahwa Pemko Batam juga sempat membahas kondisi Batam dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan tim pengendalian inflasi. Dimana, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa pada bulan Februari akan terjadi deflasi setelah pada Januari sempat inflasi. "Nah, kami inginnya seimbang, tak apa-apa inflasi asal persentasenya kurang. Jadi seimbang," ujar Amsakar.

Menurut dia, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang kesiapan menjelang Idul Fitri. Dimana pada saat itu, dipastikan akan terjadi inflasi dan berpengaruh terhadap harga sejumlah bahan pokok, harga tiket dan lainnya. "Nah ini yang harus dicegah, tapi kalau soal tiket, kami tak punya kebijakan untuk bisa mengendalikannya. Kalau untuk harga sembako dan kebutuhan lainnya mungkin bisa distrategikan dari sekarang," imbuh Amsakar. (she)

Kenaikan NJOP Pengaruhhi Harga Properti

Pemko Harus Penuhi Azas Keadilan

BATAMKOTA (BP) - Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diprediksi akan memengaruhi nilai jual properti. Karena nilai NJOP menjadi dasar dari perhitungan nilai dari Bea Perolehan Hak, Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"BPHTB diperoleh saat melakukan transaksi pembelian rumah. Jadi tentu akan ada pengaruhnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia



F. DALIL HARAHAP/BP

■ Baca **KENAIKAN...** Hal 13

Achyar Arfan

Kenaikan NJOP Pengaruhi Harga Properti

Sambungan dari hal 9

(REI) Batam Achyar Arfan, Senin (26/2) di Batamcentre.

Namun hal tersebut bukanlah sebuah masalah jika kenaikannya di daerah yang memang harga tanahnya sudah mahal seperti di Nagoya. Untuk daerah yang masih berkembang, NJOP tak perlu naik.

"Sebenarnya kenaikan NJOP bukan merupakan masalah jika menjunjung tinggi asas

keadilan. Dan juga kenaikan NJOP tidak bisa dipukul rata untuk semua zona," jelasnya.

Nilai NJOP menjadi dasar penentuan dari BPHTB dan juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Biasanya nilainya mengikuti kenaikan harga tanah di pasaran. Makanya ia sudah berdiskusi dengan Pemko Batam agar segera membuat penjabaran yang memuat mengenai zonasi NJOP. Tujuannya sederhana untuk

menjamin asas keadilan.

"Nilai NJOP untuk daerah yang sudah terkena pelebaran jalan tentu berbeda dengan yang belum. Makanya kami minta supaya Pemko mendetailkannya lebih rinci," imbuhnya.

Sedangkan pengamat kebijakan ekonomi Batam Gita Indrawan menyetujui kenaikan NJOP tersebut. Alasannya adalah karena NJOP belum pernah direvisi, dimana harga tanah Batam di pasaran

naik secara besar-besaran.

"Nilai NJOP tak pernah direvisi, sedangkan harga tanah naik terus," sebutnya.

Namun kenaikan NJOP harus diterapkan secara fleksibel mengikuti harga tanah dan juga kondisi ekonomi per wilayah di Batam. "Dan tujuannya harus benar-benar digunakan untuk digunakan, sehingga kenaikan tersebut diterima karena menerapkan azas keadilan," pungkasnya. (leo)

Ditolak Wako, Dewan Jalan Terus

Tujuh Fraksi Sepakat Bentuk Pansus Ranperda PK-5

BATAMKOTA (BP) - DPRD Kota Batam bentuk Panitia Khusus (Pansus) Pedagang Kaki Lima (PK-5) pada Rapat Paripurna, Senin (26/2). Meskipun sebelumnya ditolak Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan meminta agar dipertimbangkan, tapi tujuh dari sembilan fraksi DPRD Batam sepakat ranperda ter-

sebut dilanjutkan untuk dibahas.

Pada paripurna kemarin, Erizal Kurai ditetapkan sebagai ketua pansus, sementara Uba Ingan Sigalingging wakil ketua dan Harmidi selaku sekretaris pansus. Adapun ketujuh fraksi yang menerima untuk dibahas, adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Demo-

krat, PAN, PKS, Hati Nurani Bangsa, dan Fraksi Persatuan Keadilan. Sedangkan dua fraksi yang menolak adalah Nasdem dan Golkar.

"Kita sepakat dengan Wali Kota Batam, bahwa penataan dan pemberdayaan PK-5 harus sistematis dan terpadu sebagai komitmen penyelenggaraan daerah. Apalagi kita

punya Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang pasar, sehingga ketika ada penambahan pasal tinggal diharmonisasikan di Perda Pasar," kata Djoko Mulyono dari Fraksi Golkar.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Nasdem yang menilai Ranperda PK-5 sudah memiliki aturan yang jelas, baik di Perda 10 Tahun 2009, Peraturan

Wali Kota maupun pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Nasdem juga melihat Pemko tidak memiliki kewenangan penempatan lokasi PK-5,

“Kami sepakat dengan Wali Kota untuk dipertimbangkan kembali, sehingga proses pemberdayaan dan penataan PK-5 bisa menggunakan payung hukum yang sudah ada,” tutur juru bicara Nasdem Salion Simatupang.

Ketua Fraksi Gerindra Harmidi menilai Perda Nomor 10 tahun 2009 tentang pasar tidak mengatur sepenuhnya tentang pembiayaan dan pemberdayaan PK-5. Di perda tersebut lebih menegaskan bagaimana upaya penertiban PK-5, sehingga ketika dilakukan penertiban, Pemko tidak memiliki solusi untuk relokasi para pedagang.

“Perda Pasar belum sepenuh-

nya mengakomodir langkah penataan secara utuh, sehingga menyebabkan timbulnya masalah krusial. Makanya kami sepakat ditindaklanjuti di tahap pembahasan sesuai tata tertib,” katanya.

Mesrawati Tambubolon dari Fraksi Demokrat sepakat ranperda ini dilanjutkan dengan catatan penentuan lokasi dan batasan-batasan bagi PK-5. “Kita bisa contoh Surabaya, yang menyediakan lokasi bagi PK-5 di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Mereka diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan PAD,” kata dia.

Pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Rohaizat mengatakan, penataan dan pembinaan PK-5 sudah diatur oleh berbagai regulasi seperti Perpres dan Permedagri. Hanya saja tidak diakomodir di Per-

da 10 Tahun 2009. Banyak aturan pusat yang seharusnya menjadi turunan dari Permedagri dan Perpres tidak disematkan di perda itu. “Apalagi ini menyangkut menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Rohaizat.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta Ranperda PK-5 yang merupakan inisiatif DPRD Batam bisa dipertimbangkan kembali. Sebab, program pembangunan Batam saat ini sedang menitikberatkan pembangunan infrastruktur kota.

Selain itu, ia menilai penataan PK-5 perlu lahan yang memadai, sementara kewenangan lahan tidak Pemko Batam. Di sisi lain, aturan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kali lima ini sudah diatur di Perpres, Permendagri, dan Perwako Batam. (rng)